



Media Title	Koran Tempo		
Head Line	Wiranto Ogah Bersaksi dalam Kasus Djaja Suparman		
Date	28 Sep 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	A-7	Article Size	
Journalist	Agita Sukam Listyanti	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Wiranto Ogah Bersaksi dalam Kasus Djaja Suparman

SURABAYA—Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal (Purnawirawan) Wiranto tidak mau bersaksi atas kasus korupsi tukar guling tanah Kodam V/Brawijaya.

"Saya urusan apa? Saya enggak bisa *ngomong* apa-apa, jadi saksi apa?" kata dia kepada *Tempo* saat ditemui dalam Dialog Kebangsaan dan Ekonomi Nasional di Universitas dr Soetomo Surabaya, kemarin.

Sebelumnya, Heru Samiadji, kuasa hukum Letnan Jenderal (Purnawirawan) Djaja Suparman, terdakwa dalam kasus tersebut, mengatakan akan meminta Wiranto bersaksi di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Wiranto akan dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai Panglima ABRI atasan langsung Djaja ketika masih menjabat Pangdam V/Brawijaya pada 1997-1998. Dia juga sudah mengirimkan surat permohonan untuk menjadi saksi kepada Wiranto.

Wiranto mengaku belum menerima permintaan dari

penasihat hukum untuk menjadi saksi. Menurut dia, aset TNI terpisah dengan aset Angkatan Darat. Sedangkan yang menjadi permasalahan dalam kasus Kodam V/Brawijaya adalah aset Angkatan Darat, dan ini tidak berkaitan dengan Panglima TNI. "Yang dipermasalahkan itu pengelolaannya di angkatan. Kalau menyangkut aset TNI, baru ke Panglima TNI," kata Ketua Partai Hanura ini.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya memvonis Djaja Suparman 4 tahun penjara atas kasus korupsi ruilslag tanah Kodam V/Brawijaya seluas 8,82 hektare senilai Rp 17,6 miliar, dua hari lalu. Terdakwa juga didenda Rp 30 juta atau pidana pengganti 3 bulan penjara dan wajib membayar uang pengganti Rp 13,2 miliar atau pidana pengganti 3 bulan penjara.

Kasus ini berawal pada 1998, saat itu Pangdam Djaja menukar guling tanah milik Kodam V/Brawijaya di Dukuh Menanggal,

Surabaya, Jawa Timur, seluas 8,82 hektare kepada PTCitra Marga Nusaphala Persada (CMNP) untuk dijadikan jalan tol. PT CMNP memberikan kompensasi uang senilai Rp 17,6 miliar kepada Djaja. Dari dana tersebut, Rp 4,42 miliar digunakan untuk membangun atau merehabilitasi bangunan dan fasilitas milik Kodam. Tapi sisanya, Rp 13,2 miliar, tidak jelas penggunaannya.

Menurut Djaja, uang Rp 13,2 miliar itu digunakan untuk mengamankan Jawa Timur agar tidak tertular kerusuhan di Jakarta, dan untuk pengadaan kendaraan operasional Korem serta Kodim dan kesejahteraan prajurit. Pos terbesar dari pengeluaran itu buat pembinaan teritorial. "Tujuannya agar masyarakat solid dan tak mudah terprovokasi bertindak anarkistis," kata Jaja.

Tak terlihat kesedihan dari raut wajah Djaja setelah mendengar vonis itu. Dia malah berdeandang, "*Alusia... alusiaa.*"

● AGITA SUKMA LISTYANTI | KUKUH S.MBOWO